PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA

LAKIP 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 dapat disusun.

Perwujudan goodgovernance merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh BKAD selama tahun 2024. Diharapkan LAKIP BKAD ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholder tentang pencapaian kinerja BKAD Konawe Utara dalam priode tahun 2024

Semoga di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebihbaik bagi pembangunan Kabupaten Konawe Utara.

Wanggudu, 20 februari 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KAB. KONAWE UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Drs. IRWAN
Pembina Tingkat I, Gol. IV/b
NIP. 196901081994031016

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan aparatur yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya. diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif. stabil dan dinamis. Selain itu. diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara pemerintahan.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi. Kolusi dan Nepotisme serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas. fungsi. dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa salah satu tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dengan demikian. pelaksanaan otonomi daerah yaitu dengan memberikan kewenangan yang luas. nyata dan bertanggungjawab keoada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan. pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. serta perimbangan keuangan dengan pusat dan daerah. maka kewenangan kebijakan pelayanan juga diserahkan kepada daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme dimana dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa azas-azas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Azas Kepastian Hukum. Azaz Tertib Penyelenggaraan Negara. Azas Kepentingan Umum. Azas Keterbukaan.

Azas Proporsional dan Azas Akuntabilitas . Dalam hal ini Azas Akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan tersebut oleh Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Azas Proporsional dan Azas Akuntabilitas . Dalam hal ini Azas Akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan tersebut oleh Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Dalam rangka mewujudkan aparatur yaBerdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Maka selain dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan Kinerja dalam pelaksanaan Tugas. Pokok dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Konawe Utara secara akuntabel sebagai alat pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir tahun juga dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi. dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kineja dan tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016. Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara.

1.3 Tugas dan Fungsi

a.Tugas

Sesuai Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2018 tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara adalah melaksanakan tugas desentralisasi otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan

b.Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dalam bidang Pengelolaan keuangan daerah.
2. Pelaksanaan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian,dan evaluasi penyusunan anggaran.
3. Pelaksanaan dan penetapan kebijakan oprasioanal, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan perbendaharaan.
4. Pelaksanaan dan penetapan kebijakan oprasioanal, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan akuntansi.
5. Pelaksanaan dan penetapan kebijakan oprasioanal, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan verifikasi
6. Pengelolaan urusan kesekretariatan pelayanan teknis administrasi dinas.
7. pelaksanaan tugas dan teknis pengelolaan keuangan daerah yang meliputi anggaran, perbendaharaan, dan akuntansi
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi badan.

struktur organisasi BKAD kabupaten Konawe utara

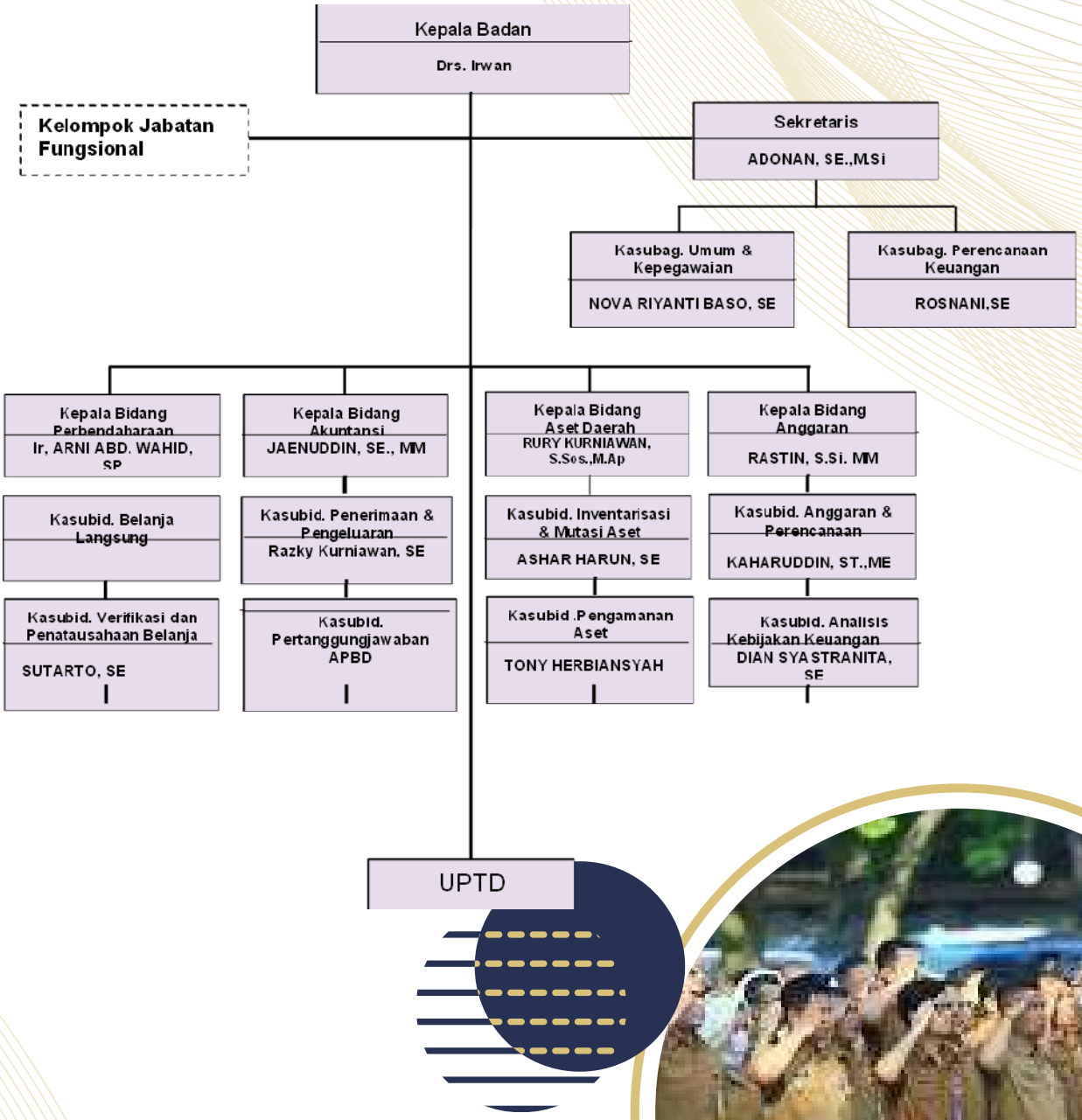

Kondisi Pegawai BKAD Konawe Utara

No	Tingkat Eselon	Jabatan	Jumlah
1	II B	Kepala Dinas	1
2	III A	Sekretaris	1
3	III B	Kepala Bidang	4
4	IV A	Kepala Seksi dan kepala sub bagian	10
5		Staf	28
Jumlah			44

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	S2	9	4	13
2	S1	18	11	28
3	D3	-	-	-
4	SMU	1	1	2
5	SMP	-	-	-
Jumlah		27	16	44

Isu – Isu Strategis

Prioritas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Berdasarkan hasil penelaahan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah terhadap sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Keuangan, Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Provinsi Sulawesi Tenggara, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, diperoleh isu-isu strategis yang berkaitan dengan BKAD Konawe Utara. Isu-isu strategis tersebut harus direspon dan disikapi dalam kerangka penyusunan Rencana Strategis BKAD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026. Adapun isu-isu strategis tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi;
2. Proses penyusunan APBD belum sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan;
3. Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sering berubah;
4. Kecepatan perkembangan teknologi informasi;
5. Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah terintegrasi;
6. Tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
7. Transparansi informasi publik; SDM pengelola keuangan dan aset daerah yang profesional dan kompeten

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.1. Visi dan Misi

Sesuai dengan Kedudukan. Tugas Pokok dan Fungsinya Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara menetapkan Visi sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG BERKUALITAS DAN AKUNTABEL"

Untuk mencapai Visi diatas berikut dijabarkan Misi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terukur. berkualitas dan berkeadilan;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan minimum
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel.transparan.professional dalam memberikan pelayanan prima

2.1.2. Sasaran Strategis

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan. maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berkualitas.
2. Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah.

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (Iku)	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target Akhir (2024)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berkualitas		Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	%	100%	100%
			Persentase Penetapan APBD dan APBDP tepat Waktu	%	100%	100%
			Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Daerah	%	90%	90%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah		Persentase aset yang terinventarisir dan tercatat	%	90%	90%

2.2. Program Kegiatan

2.1.1. Program

Program Kerja Teknis Operasional merupakan alat untuk mencapai tujuan dan mewujudkan Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara yang didanai dari APBD terdiri dari 3 (tiga) Program, 13 Kegiatan dan 73 Sub Kegiatan. Struktur program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 maupun program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung yang meliputi:

1. Program Penunjang

- Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten

2. Program Prioritas

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.1.2. Kegiatan

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi ke dalam Program Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara maka ditetapkan 13 kegiatan yang dijabarkan ke dalam 82 sub kegiatan tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	62.253.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	41.433.000,0
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	61.233.000,00
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	171.473.250,00
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	662/12 orang / bulan	82.327.008.409,89
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.348.752.000,00
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 Dokumen	114.427.500,00
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	108.999.000,00
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	94.140.000,00
10	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	43.113.000,00
11	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	72 Laporan	485.650.500,00
12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	325.636.900,00
13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46 Paket	266.355.180,00
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang	52.386.000,00

15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25 paket	47.166.000,00
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	490.909.626,00
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55 Paket	1.821.846.000,00
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Paket	284.243.400,00
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Dokumen	1.250.000.000,00
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	2.331.000.000,00
21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	190.515.000,00
22	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 unit	162.300.000,00
23	Pengadaan Mebel	3 unit	59.120.250,00
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	33.600.000,00
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	216.823.600,00
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	837.000.000,00
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25 Unit	9.307.330.000,00
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	192.297.200,00
28	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	5 unit	547.500.000,00
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	199.298.000,00
30	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	618.215.000,00
31	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	72 dokumen	202.279.500,00
32	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi PerubahanRKA-SKPD	72 dokumen	137.382.750,00
33	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	72 dokumen	137.382.750,00
34	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi PerubahanDPA-SKPD	72 dokumen	128.082.750,00
35	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	1.940.829.400,00
36	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	935.377.750,00
37	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 dokumen	1.106.786.850,00
38	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 dokumen	291.413.050,00
39	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 dokumen	360.982.300,00
40	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 dokumen	330.213.800,00
41	PembinaanPerencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	72 orang	1.094.457.700,00
42	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 dokumen	614.136.750,00
43	Penyiapan,Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	360 dokumen	216.025.250,00
44	Koordinasi,Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluas Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 dokumen	1.135.828.500,00
45	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 laporan	195.880.500,00

46	KoordinasiPelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas,Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagaiOptimalisasi Kas	1 dokumen	209.486.500,00
47	RekonsiliasiData Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait)	12 dokumen	262.762.500,00
48	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 dokumen	168.441.000,00
49	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	72 orang	1.467.230.230,00
50	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 laporan	444.852.300,00
51	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,Pendapatan-LO dan Beban	72 dokumen	489.699.300,00
52	KoordinasiPenyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanandan Semesteran	1 laporan	1.087.172.800,00
53	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 laporan	447.808.350,00
54	Koordinasidan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	860.728.600,00
55	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	140.569.000,00
56	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen	302.784.000,00
57	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	173.300.500,00
58	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	1 lembaga	1.088.039.600,00
59	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	1 laporan	157.152.600,00
60	AnalisisPerencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 laporan	19.144.421.304,00
61	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 laporan	226.080.069.729,00
62	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	23.000.000.000,00
63	Penyusunan Standar Harga	3 dokumen	871.808.750,00
64	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	785.036.700,00
65	Penatausahaan barang milik daerah	2 laporan	340.512.000,00
66	InventarisasiBarang Milik Daerah	1 laporan	412.531.000,00
67	Pengamanan Barang Milik Daerah	1 laporan	1.352.981.400,00
68	Penilaian Barang Milik Daerah	1 laporan	337.805.700,00
69	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	534.211.200,00
70	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1.874.893.850,00
71	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	72 laporan	230.089.500,00
72	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 laporan	227.065.500,00
73	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	72 orang	1.267.684.200,00
JUMLAH			397.263.850.278,89

2.3 Perjanjian Kinerja 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG AKUNTABEL DAN BERKUALITAS	PERSENTASE PENETAPAN APBD DAN APBDP TEPAT WAKTU	100%
		PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAERAH	100%
		PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN SKPD SESUA STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)	100%
2.	MENINGKATNYA PENGELOLAAN ASET DAERAH	PERSENTASE ASET YANG TERINVENTARISIR DAN TERCATAT	100%
3.	MENINGKATNYA TATA KELOLA BKAD YANG BAIK, BERSIH DAN AKUNTABEL	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA	BB

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	103.473.809.815,89	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	285.555.420.663,00	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	8.234.619.800,00	
	JUMLAH	397.263.850.278,89	

2.4 Indikator Keberhasilan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berkualitas	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100% (72 OPD)
		Persentase Penetapan APBD dan APBDP tepat Waktu	Tepat Waktu
		Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Daerah	90%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah	Persentase aset yang terinventarisir dan tercatat	90% (72OPD)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1. Pengukuran Kinerja

Data kinerja aktual diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder. Data kinerja aktual berasal dari data kinerja BKAD Kabupaten Konawe Utara yang bersumber dari Bidang di lingkungan BKAD Kabupaten Konawe Utara kemudian diolah, dievaluasi, dan dianalisis untuk memperoleh data realisasi kinerja yang relevan dengan sasaran strategis BKAD Kabupaten Konawe Utara. Alat bantu yang dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah formulir perjanjian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus

$$\%\text{REALISASI KINERJA} = \frac{\textbf{REALISASI}}{\textbf{TARGET}} \times 100$$

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut: :

Predikat	Nilai	Warna
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Sumber Permenpan RB No. 12 Tahun 2015

3.2 Capaian Kinerja

Secara umum capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Stretegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berkualitas	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100% (72 OPD)	100% (72 OPD)	100%
		Persentase Penetapan APBD dan APBDP tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
		Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Daerah	90%	84,64%	94,04%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah	Persentase aset yang terinventarisir	90% (72 OPD)	90% (72 OPD)	100%
					98,51 %

Pada Tabel 3.2 diatas dapat kita ketahui bahwa Target pada sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Terhadap SAP dan Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik. Berdasarkan indikator kinerja tersebut maka pencapaian indikator sasaran dapat tercapai dari 72 OPD semua menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Penyusunan APBD Tepat Waktu dapat terealisasi sesuai dengan Target indikator sasaran yaitu 31 Desember sebelum tanggal 31 Desember.

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja merupakan kajian analisis keberhasilan atau kegagalan serta sekaligus kendala-kendala sebagai penghambat pelaksanaan kegiatan instansi Pemerintah dapat dikemukakan melalui hasil perhitungan capaian (realisasi) kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Indikator peningkatan kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap SAP dengan capaian 100%.
2. Indikator peningkatan pengelolaan Keuangan Daerah yang baik dengan capaian 100%

Indikator peningkatan aset yang terinventarisir dan tercatat pada aplikasi teknologi informasi siklus barang daerah (ATISISBADA) dengan capaian 100%.

No.	Sasaran Strategis	indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	Target 2024	Realisai 2024	Capaian
1	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berkualitas	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100% (72 OPD)	100% (72 OPD)	100%	100% (72 OPD)	100% (72 OPD)	100%
		Persentase Penetapan APBD dan APBDP tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
		Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Daerah	90%	86%	95%	90%	84,64	94,04%
2	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah	Persentase aset yang terinventarisir	90% (72 OPD)	90% (72 OPD)	100%	90% (72 OPD)	90% (72 OPD)	100%

3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2024 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harusdievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telahdiperjanjikan adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategi	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif solusi yang telah dilakukan
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berkualitas	Presentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%	Tersedianya laporan keuangan OPD yang berkualitas sesuai dengan systm akuntansi keuangan(SAP)	Terlambatnya penyelesaian Laporan Keuangan di tingkat SKPD	koordinasi antara Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK) dan Bendahara OPD
		Persentase Penetapan APBD dan APBDP tepat Waktu	100%	100%	100%	Terintergrasinya sistem perencanaan dan pengangaran kedalam system informasi pengelolaan keuangan daerah	system informasi pengelolaan keuangan daerah yang berubah dan belum optimal	Melakukan konsultasi ke Kementrian/Lembaga terkait lainnya
		Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Daerah	90%	84,64%	94,04%	Adanya komitmen pimpinan untuk mengoptimalkn penyerapan belanja daerah	Adanya ketidaktepatan waktu OPD dalam pelaksanaan yang sudah dijadwalkan	Pemberian Surat Peringatan Kepada OPD dari Sekretaris Daerah
2.	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah		90%	90%	100%	Terinventarisasinya Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara dengan Tertib	adanya Ketidaktepatan Waktu OPD dalam Pelaksanaan Rekonsiliasi Aset	Pemberian Surat Peringatan Kepada OPD dari Sekretaris Daerah

3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi terhadap penggunaan Sumber Daya atau penyerapan anggaran belanja langsung dalam mengukur capaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari sisi sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berkualitas”, capaian kinerja berdasarkan program dengan capaian indikator kinerja “Persentase Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Terhadap SAP” mencapai 100% dan penyerapan anggaran 94,04% dan capaian indicator kinerja “Persentase penetapan APBD dan APBDP tepat waktu ” mencapai 100% dilihat dari perbandingan capaian kinerja dan penyerapan anggaran upaya yang dilakukan pada pencapaian sasaran ini sangat baik. Realisasi penyerapan anggaran lebih kecil dibanding dengan capaian kinerja, selain terdapat efisiensi penyerapan anggaran, capaian indikator ini mengindikasikan adanya dukungan/keterkaitan program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap keberhasilan capaian kinerja. Sisa Anggaran sebesar 6%
2. Dari sisi sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah” mencapai 100% dan penyerapan anggaran 89,51% penyerapan ini cukup tinggi adapun sisa anggaran sebesar 10,49% disebabkan kegiatan bersifat penyediaan, sehingga realisasi belanja sesuai dengan kebutuhan. Ini menjadi evaluasi dan kedepan akan dihitung lebih rinci lagi sehingga tingkat efisiensi semakin baik.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Target	Realisasi	Capaian (%)	
I	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berkualitas	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100% (72 OPD)	100% (72 OPD)	100%	Pengelolaan Keuangan Daerah	5.192.107.050,00	4.661.925.048,00	89,79%	10,21
		Persentase Penetapan APBD dan APBDP tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Pengelolaan Keuangan Daerah	7.869.031.350,00	5.499.561.080,00	69,89%	31,11%
		Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Daerah	90%	86%	95%	Pengelolaan Keuangan Daerah	2.291.863.342.325,00	1.939.884.781.109,00	94%	6%
II	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah	Persentase aset yang terinventarisir	90% (72 OPD)	90% (72 OPD0	100%	Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.234.619.800,00	7.371.198.972,00	89,51%	10.49

B. Realisasi Anggaran

1. program Kerja Utama

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Sumber Dana	Ket.
I	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	249.515.230.020,00	119.683.593.948,00	47,97%	APBD	
1.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	7.869.031.350,00	5.499.561.080,00	69,89%	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	585.627.750,00	286.830.000,00	48,98%	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	618.215.000,00	465.163.000,00	75,24%	APBD	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	202.279.500,00	149.950.000,00	74,13%	APBD	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	137.382.750,00	70.430.000,00	51,27%	APBD	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	137.382.750,00	120.500.000,00	87,71%	APBD	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	128.082.750,00		0,00%	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.940.829.400,00	1.603.515.580,00	82,62%	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	935.377.750,00	735.867.800,00	78,67%	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.106.786.850,00	771.933.750,00	69,75%	APBD	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	291.413.050,00	237.731.450,00	81,58%	APBD	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	360.982.300,00	238.068.720,00	65,95%	APBD	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	330.213.800,00	203.510.380,00	61,63%	APBD	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerinta Kabupaten/Kota	1.094.457.700,00	616.060.400,00	56,29%	APBD	
2.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	4.269.791.230,00	3.514.432.776,00	80,81%	APBD	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	614.136.750,00	582.872.185,00	94,91%	APBD	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	216.025.250,00	204.820.000,00	94,81%	APBD	

	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1.135.828.500,00	1.067.033.147,00	93,94%	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	195.880.500,00	121.200.000,00	61,87%	APBD	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	209.486.500,00	71.200.000,00	33,99%	APBD	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	262.762.500,00	150.960.000,00	57,45%	APBD	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	168.441.000,00	160.500.000,00	95,29%	APBD	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.467.230.230,00	1.155.847.444,00	78,78%	APBD	
3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.192.107.050,00	4.661.925.048,00	89,79%	APBD	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	444.852.300,00	407.840.280,00	91,68%	APBD	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	489.699.300,00	489.600.000,00	99,98%	APBD	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1.087.172.800,00	1.078.327.672,00	99,19%	APBD	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	447.808.350,00	385.400.000,00	86,06%	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	860.728.600,00	849.586.888,00	98,71%	APBD	
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	140.569.000,00	139.960.000,00	99,57%	APBD	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	302.784.000,00	285.411.646,00	94,26%	APBD	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	173.300.500,00	13.052.160,00	7,53%	APBD	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	1.088.039.600,00	856.746.402,00	78,74%	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	157.152.600,00	156.000.000,00	99,27%	APBD	

4.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	268.224.491.033,00	130.719.867.871,00	48,74%	APBD	
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokokdan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	19.144.421.304,00	18.431.196.097,00	96,27%	APBD	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	226.080.069.729,00	104.967.076.900,00	46,43%	APBD	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	23.000.000.000,00	7.321.594.874,00	31,83%	APBD	
5.	Pengelolaa Barang Milik Daerah	8.234.619.800	7.371.198.972	90,56%	APBD	
	Penyusunan Standar Harga	871.808.750,00	713.488.000,00	77,59%	APBD	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	785.036.700,00	690.456.000,00	100%	APBD	
	Penatausahaan barang milik daerah	340.512.000,00	313.725.700,00	88,39%	APBD	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	412.531.000,00	412.530.000,00	100%	APBD	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.352.981.400,00	1.210.809.644,00	97,61%	APBD	
	Penilaian Barang Milik Daerah	337.805.700,00	335.701.260,00	95,89%	APBD	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	534.211.200,00	531.854.900,00	92,69%	APBD	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.874.893.850,00	1.655.898.868,00	96,11%	APBD	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	230.089.500,00	230.089.500,00	100%	APBD	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	227.065.500,00	227.065.500,00	53,27%	APBD	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1.267.684.200,00	1.049.579.600,00	98,02%	APBD	

2. Program Kerja Penunjang

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Sumber Dana	Ket.
	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	103.473.809.815,89	65.688.532.300,00	63,48%	APBD	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	336.392.250,00	332.069.000,00	98,71%	APBD	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.253.000,00	62.253.000,00	100,00%	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	41.433.000,00	41.430.000,00	99,99%	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	61.233.000,00	56.913.000,00	92,94%	APBD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	171.473.250,00	171.473.000,00	100,00%	APBD	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	83.993.326.909,89	47.212.313.442,00	56,21%	APBD	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	82.327.008.409,89	995.310.000,00	1,21%	APBD	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.348.752.000,00	995.310.000,00	73,79%	APBD	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	114.427.500,00		0,00%	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	108.999.000,00	108.090.000,00	99,17%	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	94.140.000,00	-	0,00%	APBD	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	854.400.400,00	851.523.750,00	99,66%	APBD	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	43.113.000,00	43.113.000,00	100,00%	APBD	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	485.650.500,00	483.191.500,00	99,49%	APBD	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	325.636.900,00	325.219.250,00	99,87%	APBD	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	318.741.180,00	288.095.000,00	90,39%	APBD	

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	266.355.180,00	265.970.000,00	99,86%	APBD	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52.386.000,00	22.125.000,00	42,23%	APBD	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.415.680.026,00	5.650.874.405,00	88,08%	APBD	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.166.000,00	6.854.400,00	14,53%	APBD	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	490.909.626,00	432.038.750,00	88,01%	APBD	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.821.846.000,00	1.688.459.919,00	92,68%	APBD	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	284.243.400,00	281.825.000,00	99,15%	APBD	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.250.000.000,00	1.145.000.000,00	91,60%	APBD	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.331.000.000,00	1.907.038.836,00	81,81%	APBD	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	190.515.000,00	189.657.500,00	99,55%	APBD	
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaeraH	221.420.250,00	156.600.000,00	70,73%	APBD	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	162.300.000,00	156.600.000,00	96,49%	APBD	
	Pengadaan Mebel	59.120.250,00	-	0,00%	APBD	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.087.423.600,00	1.029.026.426,00	94,63%	APBD	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.600.000,00	28.900.000,00	86,01%	APBD	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216.823.600,00	183.076.426,00	84,44%	APBD	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	837.000.000,00	817.050.000,00	97,62%	APBD	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.246.425.200,00	10.168.030.277,00	99,23%	APBD	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.307.330.000,00	9.286.955.927,00	99,78%	APBD	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	192.297.200,00	135.159.350,00	70,29%	APBD	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	547.500.000,00	547.335.000,00	99,97%	APBD	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.298.000,00	198.580.000,00	99,64%	APBD	

BAB IV
PENUTUP

PENUTUP

Dalam Penyusunan laporan Akuntabilitas kinerja tahun 2024 Badan Keuangan Dan Aset Daerah kabupaten Konawe Utara setelah mengevaluasi data masukan laporan aktifitas baik internal maupun eksternal di perolah hasil kinerja akhir yang cukup mengembirakan.

Secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 pada Badan Keuangan Dan Aset DaerahKabupaten Konawe Utara berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 telah mencapai peringkat yang dapat dikategorikan sangat baik hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar 98,51% terhadap target yang ditetapkan. Dengan presentase penyerapan Anggaran 94% Hal tersebut sangat ditunjang dengan komitmen pimpinan. serta upaya yang maksimal dari seluruh komponen Bada Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara. Dalam rangka melaksanankan tugas pokok dan pungsi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara untuk mencapai visi dan misi yang telah di tetapkan. Dokumen Lakip Ini dapat di akses di web resmi BKAD kabupaten konawe utara https://bkad.konaweutarakab.go.id/ antisipasi yang perlu di perhatikan dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara di masa mendatang. Rencana strategis Badan Keuangan Dan Aset Daerah kabupaten Konawe Utara.Seiring dengan kerjasama yang dibangun antara SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan serta upaya untuk lebih meningkatkan kinerja yang dimulai dari proses perencanaan. pelaksanaan. monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara konsisten dan bertanggung jawab

Wanggudu, 20 Februari 2025
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah,
Kabupaten Konawe Utara

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Drs. Irwan
Pembina Tingkat I, Gol. IV/b
NIP 196908011994031016